

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Tentang Kepariwisataan

Sektor pariwisata Indonesia mempunyai potensi luar biasa untuk ditawarkan, akan tetapi kekurangan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dampak yang berasal dari penduduk setempat dan pengunjung pada banyak sumberdaya kunci baik alami maupun budaya.

1. Pengertian Pariwisata

Sebagai negara hukum, baiknya kita mulai menggali pengertian pariwisata dari sisi perundang-undangan. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah Daerah.

Adapun pengertian pariwisata menurut sejumlah ahli adalah sebagai berikut:

- a. Herman V. Schulalard (1910), kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.
- b. Soekadijo (1996), pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir,

pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya.³

Adapun wisata menurut UU RI Nomor 10 tahun 2009 adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. walau sekilas pengertiannya hampir sama, ada perbedaan mendasar antara pariwisata dan wisata. Pariwisata merupakan kegiatan wisata, sementara wisata merupakan kegiatan perjalanannya. Adapun orang yang melakukan wisata disebut sebagai wisatawan.⁴

Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu.

³ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali: Pustaka Larasan, 2017), h. 16-17

⁴ *Ibid.*, h. 18

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap

Definisi operasional tentang pariwisata dan kepariwisataan yang berlaku di Indonesia adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Menurut undang-undang tersebut, segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 (ayat 1)

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 1 ayat (2)

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pasal 1 ayat (3)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat (4)

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pasal 1 ayat (7)

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 1 ayat (9)

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.⁵

2. Jenis-Jenis Wisata.

Untuk mengunjunginya tempat wisata, maka harus mengetahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

⁵ Ibid., 18-19.

pariwisata tersebut. Adapun jenis sarana dan prasarana tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pariwisata menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*) pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan yang bertujuan untuk berlibur, mencari udara segar, menikmati keindahan alam, dan lain-lain.
- b. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Sites*) pariwisata yang dimanfaatkan pada hari libur bertujuan untuk beristirahat dan memulihkan kembali jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan dan kelelahan setelah sehari-hari melakukan aktifitas bekerja.
- c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*) kegiatan yang hendak ingin mendapatkan informasi kebudayaan serta pelajaran mengenai suatu adat istiadat daerah tersebut dan tata cara hidup di masyarakat.
- d. Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*) pariwisata untuk mengetahui mengenai kegiatan olahraga, menjadi penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri.
- e. Pariwisata untuk urusan dagang besar (*Business Tourism*) pariwisata yang digunakan oleh wisatawan yang ingin menggunakan waktu bebasnya untuk berbelanja serta menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lainnya.

- f. Pariwisata untuk konvensi (*Convention Tourism*) pariwisata bentuk banyaknya hotel atau bangunan–bangunan khusus dilengkapi fasilitas menunjang pariwisata konvensi.⁶

3. Infrastruktur Pariwisata.

Berdasarkan uraian diatas, pariwisata adalah salah satu industri penting di banyak negara. Hasil studi para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap beberapa hal seperti: kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perkembangan budaya, dan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dan fasilitas adalah faktor kunci bagi pengembangan pariwisata di suatu wilayah atau negara.

Menurut penulis, peran infrastruktur publik sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, dan penyebab utama kegagalan dalam mendatangkan investasi asing adalah buruknya infrastruktur. Lebih lanjut, salah satu faktor kunci yang mampu menarik kunjungan turis domestik maupun asing adalah infrastruktur publik dan/atau infrastruktur pariwisata itu sendiri. Infrastruktur publik pada umumnya diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu: air dan sanitasi, telekomunikasi, listrik, jalan, dan bandar udara dan/atau pelabuhan.

Selain infrastruktur publik, dikenal juga infrastruktur pariwisata. Infrastruktur pariwisata didefinisikan sebagai “elemen-elemen fisik yang dirancang dan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan turis”.

⁶ K Fajri, *Pengertian Pariwisata, Jenis-Jenis dan Macam-Macam serta Sarana dan Prasarannya*, <https://www.dataarsitek.com/2016/11/pengertian-pariwisata-jenis-jenis-dan-macam-macam-serta-sarana-prasarannya.html>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Beberapa pakar membedakan antara infrastruktur dengan suprastruktur. Suprastruktur adalah struktur yang bergantung pada keberadaan dan kesiapan infrastruktur. Jika infrastruktur tidak ada atau belum siap, maka suprastruktur juga tidak ada.

Menurut Salenussa, infrastruktur pariwisata meliputi beberapa item antara lain: (1) Fasilitas penunjang (*ancillary facilities*) dan fasilitas komplementer (*complementary facilities*); (2) Peralengkapan; (3) Sistem, proses, dan sumber daya untuk membuat suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) menjadi berfungsi.⁷

Berdasarkan fungsinya infrastruktur pariwisata dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Infrastruktur primer, infrastruktur sekunder, dan suprastruktur:

a. Infrastruktur Primer.

Infrastruktur utama yang membuat Daerah Tujuan Wisata (DTW) dapat diakses oleh para turis. Infrastruktur primer terdiri dari: jalan, bandar udara, pelabuhan, rel dan stasiun kereta api, dan sebagainya.

b. Infrastruktur Sekunder.

Infrastruktur yang membuat DTW atau tempat wisata dikunjungi dan dinikmati keberadaannya, suasana dan nuansa, keindahan, kenyamanan, dan keunikannya. Termasuk dalam kategori infrastruktur sekunder adalah: objek atau kegiatan wisata yang

⁷ Carlo Salenussa, *Kajian Kecukupan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Andi, 2019), h. 23

menjadi alasan kunjungan, layanan umum, layanan wisata, dan layanan kesehatan.

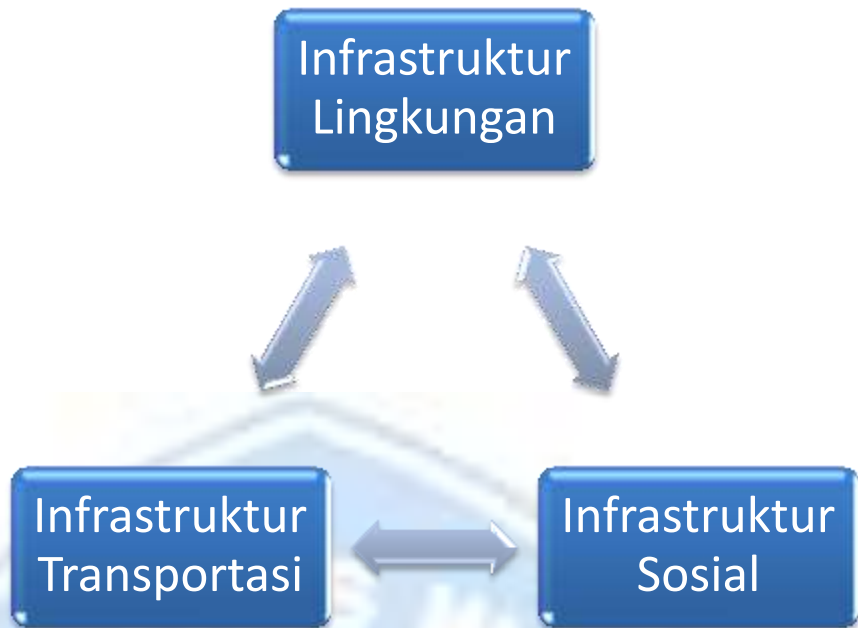
c. Suprastruktur.

Suprastruktur adalah elemen-elemen fisik dan non fisik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan turis akan akomodasi seperti: hotel/penginapan, rumah makan, cafe/bar, sarana olahraga & permainan (game), areal camping, sarana hiburan, dan lain-lain.⁸

Selain itu, infrastruktur pariwisata adalah rantai pasok (supply chain) wisata yang terdiri dari tiga domain/ranah, yaitu: (a) Infrastruktur Transportasi; (b) Infrastruktur Lingkungan; dan (c) Infrastruktur Sosial, yang berkolaborasi pada level regional untuk menciptakan DTW yang atraktif (dapat membangkitkan daya tarik & minat). Interaksi rantai pasok diantara tiga domain infrastruktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁹

⁸ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata.*, h. 105-106

⁹ Ibid., 107



Ketika kepariwisataan berkembang menjadi makin kompleks dan rumit sejalan dengan munculnya fenomena globalisasi akibat penetrasi teknologi komunikasi digital dan internet, maka infrastruktur pariwisata juga ikut berkembang, ditandai dengan munculnya kebutuhan infrastruktur yang sebelumnya tidak ada. DTW yang sebelumnya hanya bisa diakses secara fisik melalui transportasi darat, udara atau laut, sekarang bisa diakses secara maya (virtual) melalui komputer/laptop dan telpon berbasis koneksi internet.

Revolusi industri 4.0 menghadirkan fenomena Internet of Thing (IoT) dimana semua benda atau urusan dapat saling terhubung melalui internet. Internet dengan segala perlengkapan fisik pendukungnya telah menjadi infrastruktur pariwisata primer melengkapi ketiga infrastruktur konvensional sebelumnya: transportasi, lingkungan, dan sosial. Di sisi lain, kompleksitas problem kepariwisataan juga meningkat sejalan dengan hadirnya IoT. Hal itu memerlukan pengelolaan yang lebih

terstruktur dan terintegrasi sehingga penyelenggaraan pariwisata dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan sesedikit mungkin komplikasi atau faktor penyulit. Konsekuensinya, infrastruktur pariwisata membutuhkan klasifikasi baru yang lebih komprehensif sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini:¹⁰



4. Daya Tarik Wisata.

Daya tarik wisata adalah kekuatan inti yang mampu membangkitkan ketertarikan dan minat turis untuk datang berkunjung dan /atau tinggal di DTW. Pasal 1 ayat (5) UU Kepariwisata No. 10/2009 menyebutkan:

“Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan

¹⁰ Ibid., 110

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”.¹¹

Daya tarik wisata ini menentukan tingkat kepuasan dan kenyamanan turis atas DTW yang dikunjunginya. Daya tarik harus ada pada semua objek wisata baik alami maupun buatan. Ketertarikan dan minat turis terbangkit lewat keindahan (estetika), keartistikan, keintiman, keunikan dari objek wisata yang dapat dipandang atau dirasakan oleh panca indera. Daya tarik dapat membangun persepsi dan impresi (kesan) visual maupun emosional sehingga timbul sensasi-sensasi seperti: indah, eksotik, romantis, menyenangkan, dan menenteramkan jiwa.

Daya tarik adalah elemen primer yang menjadi alasan pertama dan utama turis termotivasi berkunjung ke DTW. Terdapat beberapa faktor lain yang menambah kekuatan daya tarik antara lain: iklim, fasilitas komunikasi, dan nilai tukar mata uang yang menguntungkan. Selain itu, hakikat dari daya tarik adalah “adanya sesuatu yang menraik, tidak biasa/unik”. Turis juga dapat tertarik karena “terlibat aktif” di dalam aktifitas wisata, misalnya: rafting, perburuan safari, dan lain-lain.¹²

Ada beberapa unsur penting yang menjadi daya tarik suatu industri kepariwisataan, seperti atraksi atau daya tarik, transportasi, akomodasi, fasilitas pelayanan, dan infrastruktur.

¹¹ Ibid., h. 18

¹² Carlo Salenussa, *Kajian Kecukupan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Andi, 2019), h. 34

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsurunsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

Transportasi, perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih singkat).

Akomodasi, tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.

Fasilitas pelayanan, penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain),

selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

Infrastruktur, infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

Suatu objek wisata atau destination, harus meliputi 5 (lima) unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya, maka objek wisata harus meliputi:

1) *Attractions.*

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu.

2) Fasilitas.

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang.

Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut.

3) Infrastruktur

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah.

4) Keramahan.

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing. Dalam melakukan pengembangan pariwisata, tentu tidak lepas dari peran organisasi kepariwisataan terutama organisasi kepariwisataan pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) yang mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset daerah yang berupa objek-

objek wisata. Sebagaimana suatu organisasi yang diberi wewenang dalam pengembangan pariwisata diwilayahnya, maka ia harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya.¹³

5. Sumber Daya Pariwisata.

Sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi atau kekuatan untuk dipergunakan atau dikembangkan guna menghasilkan manfaat tertentu. Pada konteks kepariwisataan, sumber daya pariwisata dimaknai sebagai segala potensi yang dapat dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pariwisata. Terdapat beberapa sumber daya pariwisata antara lain sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya sosial- budaya, sumber daya budaya, warisan (heritage), dan sumber daya manusia.¹⁴

Berdasarkan atas sumber daya yang dimiliki oleh suatu DTW, maka dapat dikembangkan suatu jenis wisata yang disebut “Pariwisata Berbasis Sumber Daya (Resource Based Tourism). Resource Based Tourism didefinisikan sebagai berikut:

“ aktifitas dan pengalaman wisata yang bergantung pada sejumlah atribut yang dimiliki alam dengan segala tatanan yang menyertainya. Jenis wisata ini biasanya hanya disukai oleh sekelompok kecil turis dengan minat khusus terhadap untuk mempelajari lingkungan dan budaya setempat”.

¹³ Ibid., h. 121

¹⁴ Ibid., h. 125

2.2. Prosedur Pengembangan Pariwisata

Sebagai ikon dan konfigurasi pariwisata Indonesia, Daerah telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata telah menjadi generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Peraturan yang berlaku dalam hak wisatawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dijelaskan pada Pasal 20 huruf c undang-undang No. 10 tahun 2009. Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dapat dijadikan rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan tanpa hal itu wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan di dalam negeri

Setiap sektor melaksanakan fungsinya dengan baik dalam satu koordinasi kelembagaan. Pariwisata berkelanjutan dalam banyak hal tetap merupakan usaha untuk ajang kompetisi dan distribusi sumber daya yang terbatas, sehingga dalam hal ini, membutuhkan solusi politik. Adanya kesepakatan implementasi tolak ukur yang jelas dari pariwisata berkelanjutan dengan kebijakan yang ditunjukkan pada orang yang telah dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana

Adapun Jenis-jenis pidana banayak variasinya, sepertihalnya ada pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang kesemuanya merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya adalah pidana tambahan. adapun Tujuan dari pemberian sanksi pidana menurut Bemmelen yaitu untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan memiliki tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu :

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis

3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.

Didalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara lain :

- a. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya.
- b. Keramah tamahan pelayanan.
- c. Penggarapan pelayanan.
- d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal.
- e. Siversifikasi dan pengendalian produk.
- f. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
- g. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi
6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan

7. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan
9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat
10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya
11. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri
12. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
13. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
14. Memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special lokal yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengatur pada khasanah budaya lokal
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau ekseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disamping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antara berbagai elemen yang saling berintegrasi dan mempengaruhi. Prinsip-prinsip kesimbangan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan Versus Konservasi

Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata.

b. Penawaran Versus Permintaan

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan. Penawaran mewakili produk pariwisata seperti taman alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana rekreasi, dan aktivitas budaya. Sedangkan permintaan mengacu kepada dasar pariwisata yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa jumlah yang akan berwisata, kegiatan menarik apa yang akan mereka lakukan dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran dan permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata. Penekanan salah satu atas yang lainnya akan membawa masalah yang akan datang.

c. Keuntungan Versus Biaya

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa ada keseimbangan distribusi keuntungan dan biaya. Hal ini menyangkut pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian fee untuk mengatasi dampak aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri perlu disusun kebijakan finansial dan fiskal yang wajar disamping juga harus memperhatikan faktor nonekonomi seperti biaya dan keuntungan sosial dan lingkungan. Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi salah satu penentu keberlanjutan pariwisata.

d. Manusia Versus Lingkungan

Tentunya pengelolaan pariwisata adalah mencari keseimbangan antara tradisional ways dengan modern praktis. Dibeberapa kawasan wisata, penduduk lokal kadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal itu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah dimasa lalu. Cepat atau lambat kondisi itu tidak akan dapat bertahan mengngat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang secara alami akan memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan penghidupannya.

Keberadaan pariwisata dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dalam kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang dan sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan perubahan perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya, penekanan dan penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian lingkungan perlu diakui.

Selain itu, pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut :

1. Perlindungan Terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. Pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan.

2. Keberlanjutan Ekonomi

Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang menguras devisa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada dikawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.

3. Peningkatan Integritas Budaya

Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka

dapat dipastikan sebaik apapun kawasan wisata yang bangun maka lambat laun akan ditinggalkan.

4. Nilai Pendidikan dan Pembelajaran

Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung pada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses penanaman modal (value) dan norma (norm) melalui proses pendidikan pembelajaran

Selain itu, pariwisata juga mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap perkembangan perekonomian negara. Alasan-alasan lainnya adalah sebagai berikut:

- b. Pariwisata sering dianggap sebagai sebuah sumber penting dari *hard foreign exchange* (pendapatan nilai tukar mata uang asing).
- c. Sebagai industri ekspor, pariwisata tidak menghadapi aturan perdagangan dan kuota seperti halnya barang-barang pabrik, bahan mentah, dan produk-produk pokok kebutuhan dasar.
- d. Wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam, misalnya kondisi iklim, sejarah, kebudayaan, dan sebagainya yang tidak didesain secara khusus. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan pariwisata terhadap infrastruktur alam mempunyai marginal cost yang rendah.
- e. Pariwisata mampu memberikan lapangan kerja baru baik di negara sedang berkembang maupun yang sudah maju.

- f. Sebagai sebuah aktivitas campuran untuk memenuhi permintaan akan jasa dan produk, pariwisata dapat menjadi pendorong bagi produk sektor lain; seperti makanan, cinderamata, dan sebagainya. Dengan adanya pariwisata yang maju, di banyak negara terjadi permintaan yang meningkat atas akomodasi dan infrastruktur lainnya.

